

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompentensi merupakan sumber utama keunggulan organisasi dalam menjalankan aktivitas penyediaan barang atau jasa berkualitas tinggi dan dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Persoalannya adalah kompetensi SDM yang ada di dalam organisasi, tidaklah selalu sesuai dengan apa yang diperlukan untuk mewujudkan keberhasilan sebuah pekerjaan. Dalam kenyataannya, ada organisasi yang cukup beruntung karena mengelola SDM yang kompeten, dengan pengetahuan, keterampilan, sikap mental dan sosial yang sangat mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Tetapi, banyak pula organisasi yang berada dalam kondisi sebaliknya.

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu faktor pokok dalam proses pembangunan yang dinamis, sehingga dibutuhkan peranan yang lebih besar terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terlihat jelas bahwa faktor manusia merupakan modal utama yang perlu diperhatikan dalam suatu organisasi pemerintahan, karena keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan ditentukan oleh kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusianya.

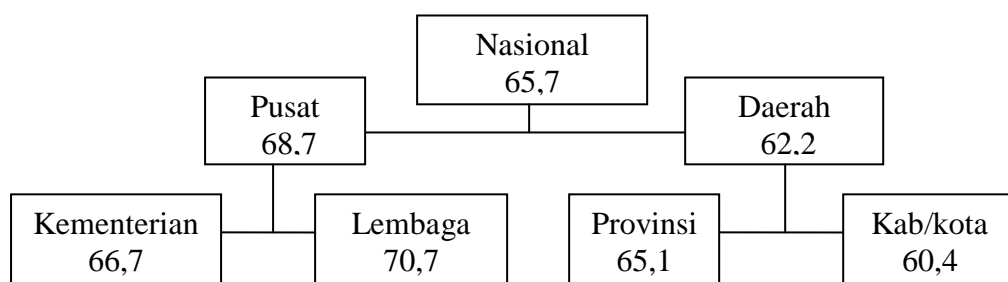
ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas

dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) serta mewujudkan pelayanan publik yang baik, efektif, efisien dan berkualitas tentunya perlu didukung adanya ASN yang profesional, bertanggung jawab, adil, jujur dan kompeten dalam bidangnya. Dengan kata lain, ASN dalam menjalankan tugas tentunya harus berdasarkan pada profesionalisme dan kompetensi sesuai kualifikasi bidang ilmu yang dimilikinya.

Kompetensi aparatur yang dipersyaratkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 69 ayat (3) menyebutkan bahwa kompetensi terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural. Berdasarkan peraturan tersebut, tentunya ketiga ciri kompetensi itu harus dimiliki oleh seorang ASN. Kompetensi ini pun tentunya tidak terlepas dari pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman ASN. Untuk lebih spesifiknya lagi, seperti yang disebutkan oleh Spencer dalam Sedarmayanti (2016:21) bahwa terdapat 5 karakteristik kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, sifat dan motivasi.

Gambar 1.1.
Nilai Indeks Profesionalitas ASN Nasional Tahun 2019



Sumber: Data Sekunder Badan Kepegawaian Negara 2021

Melihat data yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara terkait Indeks Profesionalitas ASN di Indonesia tahun 2019 menunjukkan tidak adanya daerah Provinsi yang masuk dalam kategori tinggi terkait indeks profesionalitas ASN. Hanya ada tiga daerah yang tergolong dalam kategori sedang, yaitu Jawa Barat, Kepulauan Riau dan Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat kompetensi ASN diberbagai daerah.

Tabel 1.1
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS di Lingkungan Instansi
Pemerintah Bagian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2018

No.	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan Minimal
1.	Analisis kependudukan dan pencatatan sipil	S-1 / D-4 bidang kependudukan / pemerintahan / manajemen / kebijakan publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
2.	Pengadministrasian akta kelahiran dan kematian	SLTA / D-1 / D-2 / D-3 bidang manajemen perkantoran / administrasi perkantoran / tata perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
3.	Pengelolaan sistem informasi kependudukan	D-3 / bidang pemerintahan / manajemen / kebijakan publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
4.	Penyurvei batas wilayah administrasi	S-1 / D-4 bidang hukum / pemerintahan / teknik sipil / pertanahan / kebijakan publik / sosial dan politik / administrasi / pemetaan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
5.	Penyusunan analisis dampak kependudukan	S-1 / D-4 bidang manajemen / pemerintahan / ekonomi / sosial dan politik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.

Sumber : Permenpan dan Reformasi Birokrasi RI No.41, Februari 2022

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.41 Tahun 2018 merupakan peraturan yang memberikan kualifikasi pendidikan minimal pada PNS di lingkungan instansi pemerintah, salah satunya yaitu pada bagian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Peraturan ini

memberikan secara rinci mengenai pendidikan terhadap jabatan yang akan diemban oleh seorang PNS tersebut.

Salah satu dinas yang mempunyai peran serta tugas yang mengharuskan aparatur memiliki tingkat kompetensi yang memadai ialah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Sesuai dengan tugasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas banyak berurusan dengan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga menuntut aparatur yang terlibat di dalamnya memiliki kompetensi dan kapasitas yang unggul. Selain itu, kompetensi juga dibutuhkan untuk memberikan pelayanan prima dalam pelaksanaan tugas.

Tabel 1.2.
Data Analisa Jabatan Pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sambas
Desember Tahun 2021

No.	Nama	Pangkat/ gol	Jabatan	Latihan Jabatan	Pendidikan
1.	Hj. Wahidah, SE, M.Si	IV/c	Kepala Dinas	DIKLAT PIM.II	S.2 (Magister Ekonomika Pembangunan)
2.	Henny Susanti Widyasari, SE	IV/b	Sekretaris	ADUM DIKLAT PIM.II	S.1 (IESP)
3.	Syahrial, SH, I, MH	IV/a	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	DIKLAT PIM.III	S.I (Syariah Ilmu Hukum)
4.	Agusmini Erawati, SE	IV/a	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	DIKLAT PIM.IV	S.I (Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan)
5.	Yusirani, S.Kom	IV/a	Kabid Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk	DIKLAT PIM.IV	S.I (Manajemen Informatika)
6.	Muslim, S.T.	IV/a	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DIKLAT PIM.IV	S.I (Manajemen Informatika)

7.	Izzuardi	III/d	Administrator Database Kependuduka dan Ahli Muda	Belum pernah	SLTA (IPS)
8.	Erna Suriani, SE	III/d	Administrator Database kependudukan Ahli muda	Belum pernah	S.1 (Ekonomi Akuntansi)
9.	Rusdiana, SE	III/d	Administrator Database kependudukan Ahli muda	Belum pernah	S.1 (Ekonomi Akuntansi)
10.	Marliana, S.Sos	III/d	Administrator Database kependudukan Ahli muda	Belum pernah	S.1 (Administrasi Negara)
11.	Ari Adrian, S.Kom, M.A.P.	III/d	Administrator Database kependudukan Ahli muda	Belum pernah	S.1 (Manajemen Informatika) S.2 (Ilmu Administrasi Negara)
12.	Diva Lianita, SE	III/d	Perencana Ahli Muda	Belum pernah	S.1 (Manajemen)
13.	Dinar Saraswati, S.E.	III/d	Kassubag Keuangan	Belum pernah	S.1 (Akuntansi)
14.	Siti Rahmah, S.AP.	III/c	Kassubag Umum dan Kepegawaian	Belum pernah	D.III (Administrasi Perkantoran) S.1/ UT (Ilmu Administrasi Negara)
15.	Yunarni	III/b	Pengadministrasi Kependudukan	Belum pernah	SLTA (Fisika)
16.	Nazari Hadani, A.Md.	III/b	Pengelola Kepegawaian	Belum pernah	D.III (Manajemen Perkantoran)
17.	Edriani, A.Md.	III/b	Pengelola Mutasi Penduduk	Belum pernah	D.III (Manajemen Informatika)
18.	U. Robi Yushanda, S.Akun.	III/b	Penyusun Bahan Publikasi dan Informasi	Belum pernah	D.III (Manajemen Informatika)
19.	Sri Kurniati, S.Hum	III/a	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belum pernah	S.1 (Sejarah dan Peradaban Islam)
20.	Ikmal Samsuri, SE	III/a	Analisis Data dan Informasi	Belum pernah	S.1 (Manajemen)
21.	Rustian, S.I.P.	III/a	Pemeriksa Kependudukan	Belum pernah	S.1 (Ilmu Pemerintahan)
22.	Syarif Nurizwan, S.Sos.	III/a	Analisis Bimbingan	Belum pernah	S.1 (Ilmu Administrasi)

			Pelayanan dan Konsultasi		Negara)
23.	Yusak Aditya, S.STP.	III/a	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belum pernah	D.IV (Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
24.	Darmanto	II/d	Pengadministrasi Akta dan Kematian	Belum pernah	SLTA (IPA)
25.	Hanafi	II/d	Pengadministrasi Akta dan Kematian	Belum pernah	SLTA (IPS)
26.	Hafiq Donal	II/d	Pengadministrasi Kependudukan	Belum pernah	SLTA (IPS)
27.	Silvia Wulandari	II/d	Bendahara	Belum pernah	SLTA (Fisika)
28.	Rusihan	II/d	Pengadministrasi Kependudukan	Belum pernah	SLTA (Bahasa)
29.	Novi Mariyanti	II/c	Pengadministrasi Kependudukan	Belum pernah	SLTA (Sosial)

Sumber: Data Sekunder Disdukcapil Kabupaten Sambas, Februari 2022

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas menjadi salah satu penentu dalam mengukur keberhasilan pemerintahan kabupaten Sambas. Untuk sampai ke tujuan tersebut, maka dinas ini dituntut untuk memiliki pegawai yang cakap dan aparatur yang memiliki kompetensi di bidangnya. Namun dalam praktiknya, kompetensi ASN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas nyatanya masih perlu ditingkatkan lagi. Data lapangan menyatakan bahwa masih terdapat aparatur yang belum memenuhi kualifikasi kompeten.

Berdasarkan data kualifikasi pendidikan ASN yang diatur dalam Permenpan No.41 Tahun 2018 yang telah ditampilkan di atas, nyatanya masih belum sesuai dengan praktiknya di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Terdapat ketidaksesuaian antara pendidikan dengan jabatan

yang diemban tentu akan berimbas kepada hasil kerja ASN nya itu sendiri menjadi kurang optimal. Ditambah lagi bahwa terdapat beberapa ASN nya yang masih belum pernah mengikuti diklat atau latihan jabatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas"**.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Terdapat ketidaksesuaian antara pendidikan dengan jabatan yang diemban oleh beberapa Aparatur Sipil Negara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.
2. Terdapat beberapa Aparatur Sipil Negara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yang belum pernah mengikuti diklat atau latihan jabatan.

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perlu dibuat fokus penelitian. Penelitian ini akan membahas tentang 5 karakteristik kompetensi Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

1.4. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dapat dibuat rumusan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana karakteristik kompetensi Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran dan analisis dari 5 karakteristik kompetensi Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi, serta sebagai bahan perbandingan bagi yang perlu menggunakan dasar-dasar untuk penelitian selanjutnya mengenai konsep kompetensi Aparatur Sipil Negara.

1.6.2. Manfaat Praktis

1.6.2.3. Bagi Individu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya wawasan konsep praktek di dunia kerja terutama mengenai pentingnya kompetensi aparatur dalam menghasilkan kualitas kerja yang maksimal.

1.6.2.2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negaranya.